

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Bandung.
- Asmara, Galang, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Daim, Nuryanto A, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2010, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 32.
- Gilling, Bryan, 1998, *The Ombudsmanin New Zealand*, Dunmore Press, Welington.
- Hadjon, Philipus M, dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia, 2007, *Teori dan Metode Pengawasan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, dkk, 2003, *Panduan Investigasi untuk Ombusman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.
- Juliantara, Dadang, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Masturi, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Najib, Mokhammad, 2008, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik : Rekonstruksi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Adil, Berkualitas, Demokratis dan Berbasis Hak Rakyat*, In-TRANS Publishing, Malang.
- Nugroho, Dwidjowijoto Rian dan Idris, Patarai, 2008, *Ombudsman Kota Makassar: Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
- Puspitosari, Hesti, dkk, 2011, *Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, SETARA Press, Malang.
- M. Ryaas Rasjid, 1998, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, LPES.
- Ratminto dan Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Roswati, Handayani, dkk, 2006, *Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintah yang Baik*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rusli, Budiman, 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.
- Sinambela, dan Poltak, Lijan, dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sirajudin, dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali Indonesia, Jakarta.

-----, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

-----, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.

-----, dkk, 2002, *Ombudsman Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Sujata, Antonius dan Surachman, RM 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, Komisi Ombudsman Indonesia, Jakarta.

-----, RM, 2003, *Efektivitas Ombudsman Indonesia : Kajian Tindak Lanjut Kasus-kasus Tertentu Digest of Selected Cases*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Tauda, Gunawan A, 2012, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta.

Taufiqurakhman, 2014, *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta.

-----, 2015, *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman RI Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Winarno,Budi, 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang **Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan**, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Bryan Tambunan, “Peranan Ombudsman dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar pada Bidang Pendidikan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017.

Dewi Purwati, “Peranan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Laporan Maladministrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.

Didit Prayitno, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Ombudsman Daerah”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.

Dinny Wirawan Pratiwie, “Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia)”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

Eka Reza Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Florentia Switi Andari, “Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

Johanes Widijantoro, “Model Ombudsman Sebagai Penguatan Akses Keadilan Konsumen di Indonesia”, *Disertasi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019.

Novia Kencana, “Dinamika Kelembagaan (Suatu Kajian tentang Proses Penggabungan Lembaga Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta DIY)”, *Tesis*, Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 2015.

- Rizki Wahyudi, “Studi Perbandingan Kedudukan Lembaga Negara Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dengan Negara Swedia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.
- Sri Anggun Mutia Hunowu, “Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019.
- Tasria Lestari, “Peran dan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik (Studi Kajian Pengawasan Terhadap Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 di Kota Makassar)”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Teuku Saiful, “Efektivitas Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 2005.
- Thalis Noor Cahyadi, “Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY)”, *Tesis*, Minat Studi Ekonomi Islam Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2010.
- Winarso, “Ombudsman Republik Indonesia Setelah Belakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

D. Jurnal, Karya Ilmiah dan Majalah

- Abdul Muis, “Efektivitas Ombudsman Indonesia”, *Jurnal Madani* Edisi II/ Nopember 2010.
- Elga Andina, “Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik”, *Majalah Info Singkat* Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017.
- Moh. Hasyim, 2011, *Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Beberapa Contoh Kasus)*, Jurnal Ombudsman Daerah, Yogyakarta dikutip juga dari Antonius Sujata, dkk, *Ombudsman*

Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang, 2002, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Nadia Hidayati, dkk, “Perbandingan Administrasi Publik Antara Swedia dan Indonesia”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2, 2008: 179-192.

Wahyono Darmabrata, *Perbandingan dan Pendidikan Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.30 No.4 Tahun 2000, Oktober-Desember 2000.

Zamzuri, “Arti Pentingnya Lembaga Ombudsman Bagi Indonesia”, *Koleksi Karya Ilmiah yang diajukan pada Seminar Hukum pada Fakultas Hukum UGM pada 16 Oktober 1987*.

Winarso, 2008, *Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia*, di Antonius Sujata, *Suara Ombudsman Nomor 3 Tahun 2008*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

F. Internet

Aris Shoimin, “Dampak Sistem Zonasi PPDB”, <https://www.kompasiana.com/arishoimin/5cdcc1a795760e6689624c02/dampak-sistem-zonasi-ppdb>, diakses tanggal 31 Oktober 2019.

Ali Ridho, dkk, “Restrukturisasi Fungsi dan Wewenang Ombudsman dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Demi Tercapainya Prinsip Kepemerintahan yang Baik”, https://www.academia.edu/5988041/RESTRUKTURISASI_FUNGSI_DAN_WEWENANG_OMBUDSMAN, diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

Bernas News, “FORMAYO Kantongi 500 Aspirasi Masyarakat Yogyakarta”, <https://bernasnews.com/formayo-kantongi-500-aspirasi-masyarakat-yogyakarta/#>, diakses tanggal 1 November 2019.

Binus University, “Dosen Binus menjadi pembicara pada seminar nasional Ombudsman Republik Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/28/dosen-binus-menjadi-pembicara-pada-seminar-nasional-ombudsman-republik-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, “Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Jenjang SMA SMK SLB di Daerah Istimewa

Yogyakarta”,

<http://www.dikpora.jogjaprov.go.id/web/halaman/detail/penerimaan-peserta-didik-baru-tahun-2019-jenjang-sma-smk-slb-di-daerah-istimewa-yogyakarta>, diakses tanggal 1 November 2019.

Iman Dani, “Independensi Ombudsman”,
<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman> diakses tanggal 21 Oktober 2019.

Kompas, “Dewan Pers Perlu Bentuk Ombudsman Pers”,
<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F14725/Dewan%20Pers%20Perlu%20Bentuk%20Ombudsman%20Pers.htm>,
diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

Ombudsman Republik Indonesia, “Ombudsman Rekomendasikan Juknis PPDB SMA DIY direvisi Sultan : Wajar Masyarakat Keberatan Zonasi”,
<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-rekomendasikan-juknis-ppdb-sma-diy-direvisi--sultan--wajar-masyarakat-keberatan-zonasi>, diakses tanggal 2 November 2019.

Ombudsman Republik Indonesia, “PPDB dan Sistem Zonasi 2019”,
<https://www.ombudsman.go.id/news/r/ppdb-dan-sistem-zonasi-2019>,
diakses tanggal 31 Oktober 2019.

Sveriges Riksdag, “Documents and Laws”,
<https://www.riksdagen.se/en/documents-and-laws/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Sveriges Riksdag, “Examines The Work of The Government”,
<https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/what-does-the-riksdag-do/examines-the-work-of-the-government/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Sveriges Riksdag, “Makes Laws”, <https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/what-does-the-riksdag-do/makes-laws/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Yohanes Enggar Harususilo, “Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi”, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>, diakses tanggal 1 November 2019.

G. Wawancara Penelitian

Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Penulis secara langsung kepada Budhi Masthuri, S.H. selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan DIY pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 pukul 09.03 WIB.

Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Penulis secara langsung kepada Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. selaku ahli/pakar hukum mengenai Ombudsman pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.05 WIB.